

PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH

# PROVINSI PAPUA BARAT



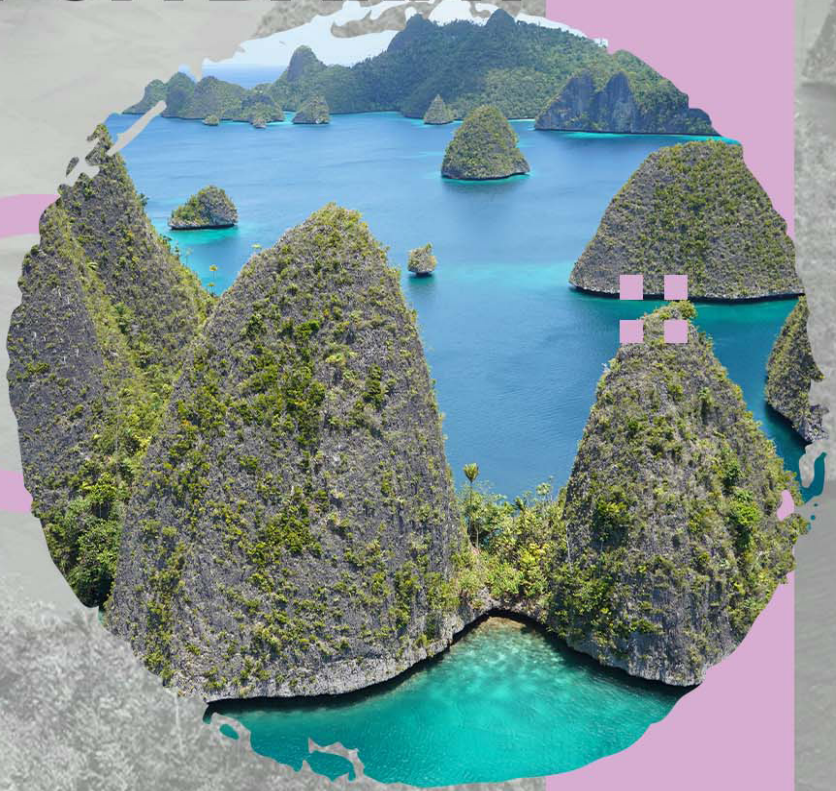






PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH

# PROVINSI PAPUA BARAT







## **Peta Pembinaan Provinsi Papua Barat**

Jakarta: Bina Praja Press, 2022  
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo  
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press  
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:  
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat  
pid@litbangkemendagri.com  
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## **TIM PENULIS**

**Pengarah:**

Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris Jenderal

**Penanggungjawab:**

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri  
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri  
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri

**Penulis:**

1. Khusnul Khotimah, S.Stat
2. Drs. Awan Yanuarko, M.Si

## **SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kepala Badan Strategi  
Kebijakan Dalam Negeri  
Kemendagri

**Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd**



## **SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH**

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

**Drs. Aferi S. Fudail, M.Si**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR TABEL

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	2

### **BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA**

A. KABUPATEN KAIMANA	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	6
Aspek Satuan Inovasi Daerah	7
B. KABUPATEN MANOKWARI	13
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	13
Aspek Satuan Inovasi Daerah	14
C. KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	19
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	19
Aspek Satuan Inovasi Daerah	20
D. KABUPATEN TELUK WONDAMA	26
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	26
Aspek Satuan Inovasi Daerah	27
E. KOTA SORONG	32
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	32
Aspek Satuan Inovasi Daerah	33

<b>BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI</b>	37
---	----

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kaimana
- Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kaimana
- Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kaimana
- Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kaimana
- Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kaimana
- Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kaimana
- Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kaimana
- Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kaimana
- Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kaimana
- Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kaimana
- Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Manokwari
- Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manokwari
- Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Manokwari
- Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Manokwari
- Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Manokwari
- Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Manokwari
- Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Manokwari
- Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Manokwari



Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Manokwari

Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manokwari

Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Manokwari Selatan

Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manokwari Selatan

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Manokwari Selatan

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Manokwari Selatan

Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Manokwari Selatan

Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Manokwari Selatan

Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Manokwari Selatan

Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Manokwari Selatan

Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Manokwari Selatan

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manokwari Selatan

Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Teluk Wondama

Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Teluk Wondama

Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Teluk Wondama

Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Teluk Wondama

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Teluk Wondama

Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Teluk Wondama

Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Teluk Wondama

Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Teluk Wondama

Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Teluk Wondama

Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Teluk Wondama

Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Sorong

Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Sorong

Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Sorong

Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Sorong

Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Sorong

Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Sorong

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Sorong

Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Sorong

Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Sorong

Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Sorong

Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2 Daftar Inovasi Provinsi Aceh beserta Skor Kematangannya

Tabel 3 Daftar Inovasi Provinsi Kep. Bangka Belitung beserta Skor Kematangannya

Tabel 4 Daftar Inovasi Provinsi Bengkulu beserta Skor Kematangannya

Tabel 5 Daftar Inovasi Provinsi Jambi beserta Skor Kematangannya

Tabel 6 Daftar Inovasi Provinsi Kep. Riau beserta Skor Kematangannya

Tabel 7 Daftar Inovasi Provinsi Lampung beserta Skor Kematangannya

Tabel 8 Daftar Inovasi Provinsi Riau beserta Skor Kematangannya

Tabel 9 Daftar Inovasi Provinsi Sumatera Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 10 Daftar Inovasi Provinsi Sumatera Selatan beserta Skor Kematangannya

Tabel 11 Daftar Inovasi Provinsi Sumatera Utara beserta Skor Kematangannya





# ***BAB I***

---

## ***PENDAHULUAN***





## A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman [indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id](https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id). Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Papua Barat Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelembagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara

kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

## **B. MANFAAT**

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Papua Barat. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

## **C. TUJUAN**

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

## **D. RUANG LINGKUP**

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi Papua Barat pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kota Sorong



Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Aspek	Variabel	Indikator
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
		Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian
	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	
	Roadmap SiDA	
	SDM	Nilai IPM
		Penghargaan Bagi Inovator
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
		Replikasi
	Kecanggihan Produk	Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
		Pedoman Teknis
	Kecepatan Bisnis Proses	Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan

Aspek	Variabel	Indikator
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah



# ***BAB II***

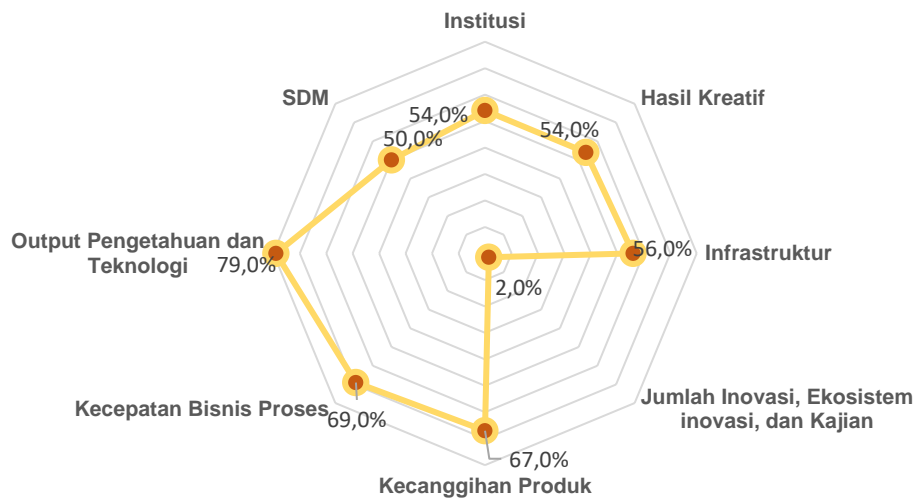
---

***INOVASI DAERAH KLASTER  
KABUPATEN DAN KOTA***





## A. KABUPATEN KAIMANA



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kaimana

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kaimana memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu sebesar 79.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal atau berada pada parameter 3. Variabel berikutnya yang memiliki skor cukup tinggi adalah variabel Kecepatan Bisnis dan Kecanggihan Produk dimana secara berturut-turut memiliki skor sebesar 69.0% dan 67%. Sebaliknya, variabel dengan persentase capaian terendah adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian, yaitu hanya sebesar 2.0%.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



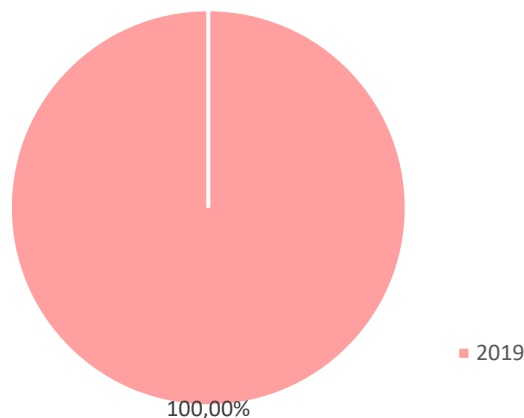
Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kaimana

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah terdapat empat indikator yang mengindikasikan perkembangan kualitas aspek Pemerintahan Daerah. Indikator tersebut adalah Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan angka 0.61%. Artinya angka kemiskinan pada Kabupaten Kaimana sebesar 0.61%, lebih tinggi dibandingkan penurunan yang ada pada standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0.02%. Indikator berikutnya adalah variabel Nilai IPM yang menunjukkan peningkatan sebesar 0.41%, lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan angka 0%. Selanjutnya indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 4.90%, adapun standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 8%. Namun demikian, pencapaian Kabupaten Kaimana tergolong cukup baik. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi menunjukkan peningkatan sebesar 1.64%. Angka ini lebih tinggi dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%.

Sementara itu, melalui grafik di atas juga diketahui bahwa terdapat tiga indikator yang mengindikasikan penurunan perkembangan aspek satuan pemerintah daerah. Indikator pertama adalah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar -0.39. Artinya tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Kaimana meningkat sebesar 0.39%. Namun demikian, angka ini masih dalam cakupan lebih baik dibandingkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan peningkatan sebesar 0.92%. Indikator berikutnya adalah Kualitas Peningkatan Perizinan yang jelas menunjukkan penurunan sangat tinggi sebesar 45.89%. Indikator terakhir yang menunjukkan penurunan kualitas adalah indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang menunjukkan angka penurunan sebesar 4.27%, sedangkan penurunan pada standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kaimana

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kaimana secara keseluruhan sudah mulai diperkenalkan dan diterapkan pada tahun 2019. Hal ini ditunjukkan oleh diagram persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kaimana pada Gambar 3 yang mencapai 100% untuk tahun 2019. Tidak ada inovasi yang dilaporkan diterapkan pada tahun 2022.

### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

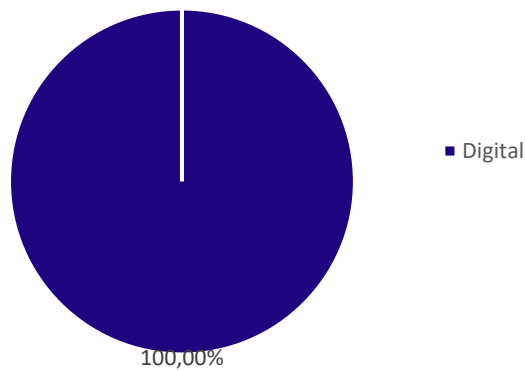


Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kaimana

Berdasarkan diagram yang disajikan pada Gambar 4 di atas, diketahui bahwa inovasi secara keseluruhan yang ada pada Kabupaten Kaimana berupa Inovasi Pelayanan Publik. Hal ini ditunjukkan oleh persentase diagram yang mencapai 100% pada Inovasi pelayanan public. Tidak ada bentuk inovasi tata kelola pemerintahan maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kaimana

Jenis inovasi daerah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Digital, NonDigital dan Teknologi. Persentase masing-masing jenis inovasi daerah pada Kabuapten Kaimana ditampilkan pada Gambar 5 dalam bentuk diagram. Diagram pada gambar 5 menunjukkan bahwa keseluruhan inovasi pada Kabupaten Kaimana berupa inovasi digital, yaitu mencapai 100%.

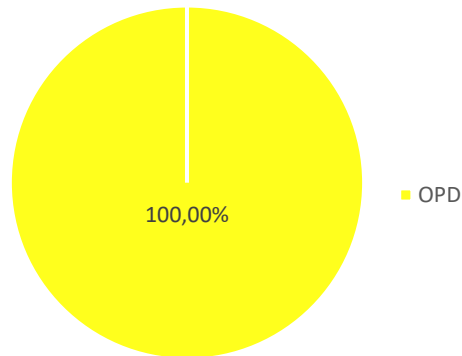
### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kaimana

Berdasarkan grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kaimana pada Gambar 6, diketahui bahwa jumlah inovasi daerah pada Kabupaten Kaimana sebanyak 4 inovasi. Adapun seluruhnya merupakan inovasi yang diterapkan di tahun 2019 dan berupa inovasi digital.

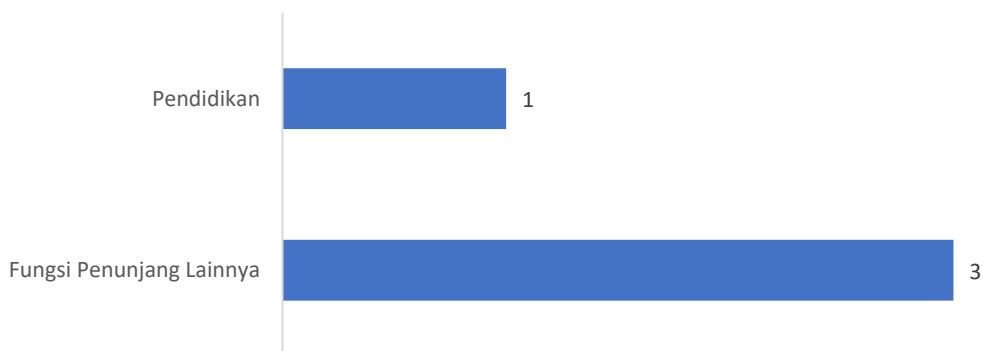
#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kaimana

Keseluruhan inovasi yang terdapat pada Kabupaten Kaimana diinisiasi oleh OPD. Hal ini ditunjukkan oleh diagram persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Gambar 7 yang memperlihatkan bahwa OPD mencapai persentase 100%.

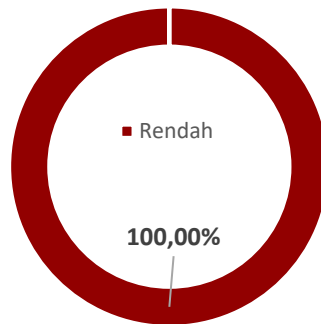
#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kaimana

Gambar 8 menunjukkan grafik jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan pada kabupaten Kaimana. Grafik tersebut menunjukkan bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kaimana terbagi atas dua urusan pemerintahan, yaitu urusan Pendidikan sebanyak 1 inovasi dan urusan Fungsi Penunjang Lainnya sebanyak 3 inovas.

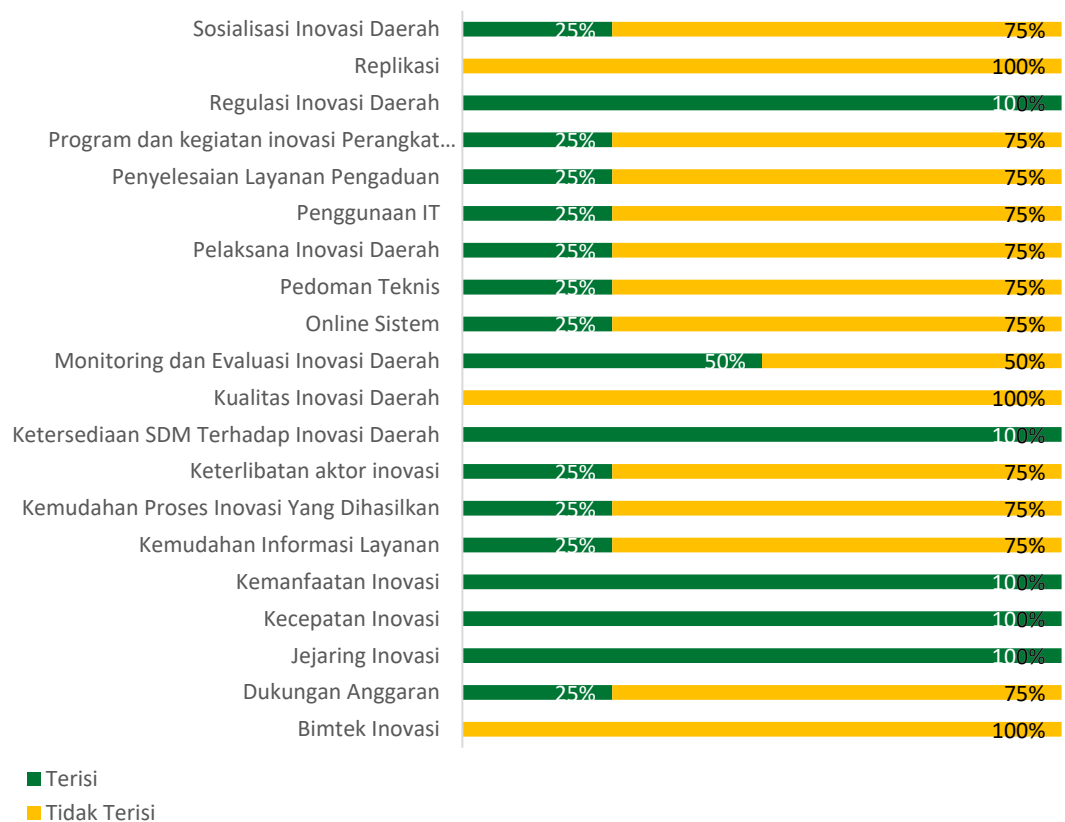
### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kaimana

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, keseluruhan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kaimana masih berada pada level kematangan rendah, yaitu mencapai 100%. Artinya inovasi yang terdapat pada Kabupaten Kaimana memiliki skor kematangan di bawah 50.

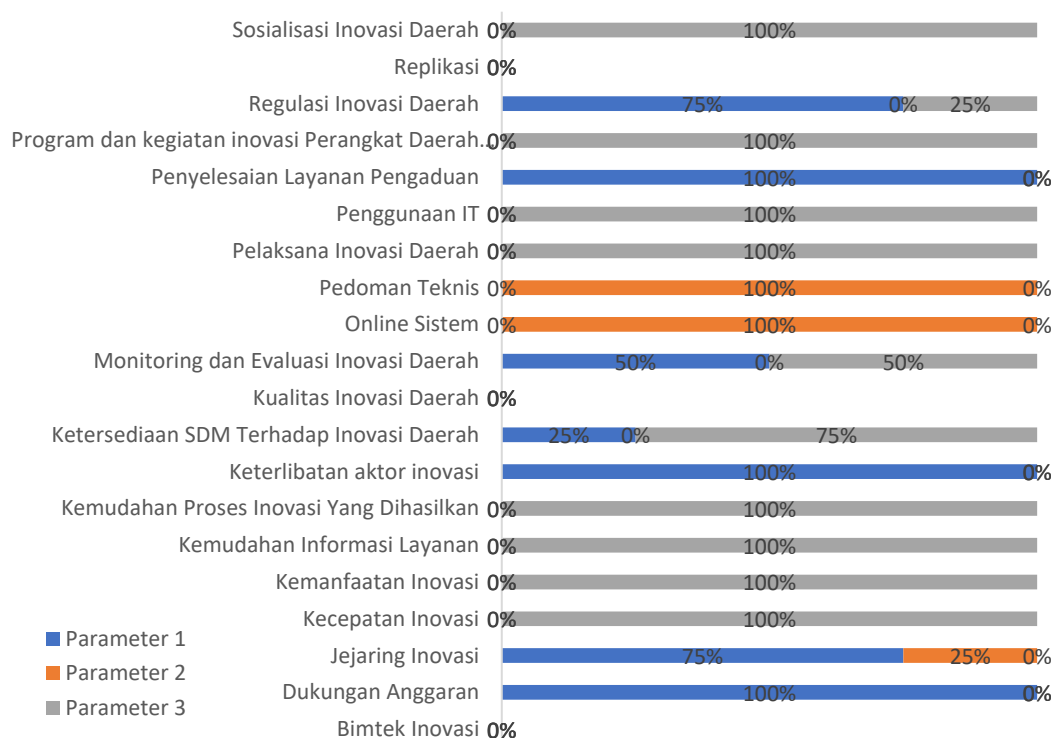
### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kaimana

Gambar 10 menampilkan grafik keterisian data pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kaimana, Melalui grafik tersebut terlihat tingkat keterisian data (warna hijau) lebih kecil dibandingkan dengan tingkat ketidakterisian data (warna kuning). Persentase keterisian data sebesar 41.25%, sedangkan ketidakterisian data sebesar 58.75%. Indikator data dukung dengan keterisian tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi, dan Jejaring Inovasi. Sebaliknya, indikator dengan ketidakterisian tertinggi adalah indikator replikasi, Kualitas Inovasi Daerah, dan Bimtek Inovasi.

#### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa dominansi data dukung tersusun atas parameter 3. Sebanyak 47.50% data dukung tersusun atas parameter 3 (ditunjukkan melalui diagram berwarna abu-abu). Selanjutnya sebanyak 11.25% data dukung tersusun atas parameter 2 dan sebanyak 26.25% data dukung tergolong dalam parameter 1. Adapun 15% indikator lainnya tidak terisi data dukung.

#### j. Daftar Inovasi Kabupaten Kaimana beserta Skor Kematangannya

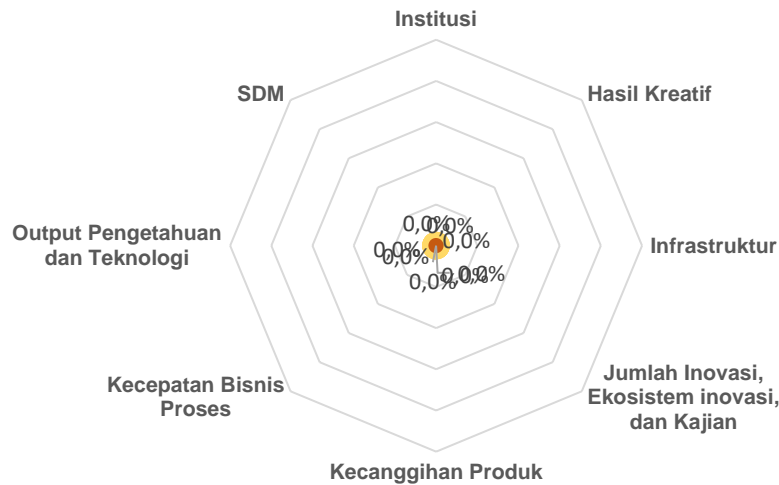
Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Kaimana beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Pemasangan alat perekam data transaksi Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Hiburan;	35
Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Online	35



<b>Nama Inovasi</b>	<b>Skor Kematangan</b>
Integrasi Host to host Data Pertanahan dengan data SIM PBB-P2 dan SIM BPHTB	35

## B. KABUPATEN MANOKWARI



Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Manokwari

Berdasarkan diagram capaian variabel ukur indeks inovasi daerah Kabupaten Manokwari yang disajikan pada Gambar 12 di atas, terlihat bahwa keseluruhan variabel memiliki persentase 0%.

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

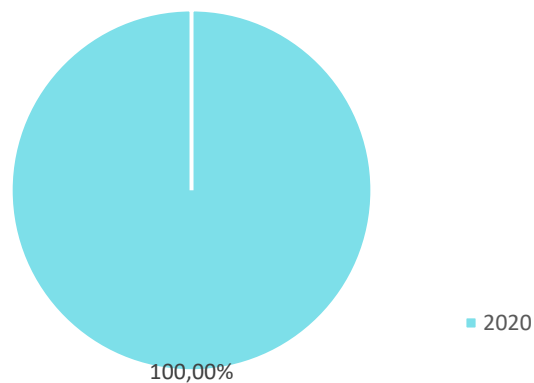


Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manokwari

Gambar 13 menunjukkan grafik capaian aspek Satuan Pemerintah Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah yang diperoleh dari Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang belum mengalami perkembangan yang signifikan secara keseluruhan. Seluruh aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan angka 0.00%, yang artinya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Manokwari

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari diterapkan pada tahun 2020. Tidak ada inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 di Kabupaten Manokwari.

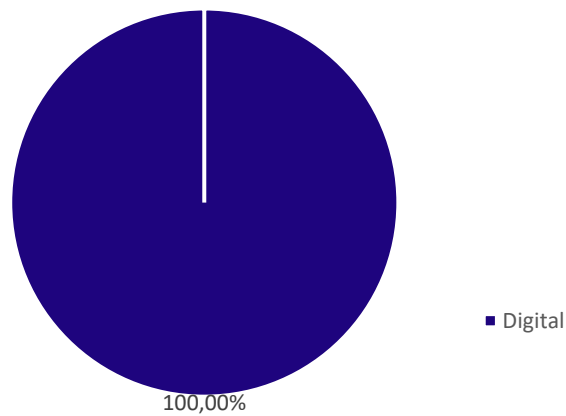
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Manokwari

Gambar 13 menampilkan diagram persentase inovasi berdasarkan bentuk inovasi di Kabupaten Manokwari. Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari, diketahui bahwa seluruhnya merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah.

**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Manokwari

Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi di Kabupaten Manokwari yang disajikan pada Gambar 16 menunjukkan bahwa dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari, 100% atau seluruhnya merupakan merupakan inovasi digital.

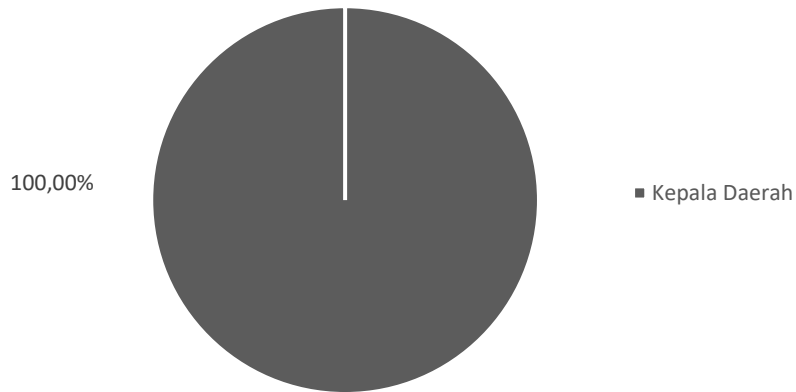
**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Manokwari

Berdasarkan tahun dan jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari, diketahui bahwa hanya ada satu inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari. Jenis inovasi tersebut adalah inovasi Digital dan diterapkan pada tahun 2020.

**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Manokwari

Gambar di atas menunjukkan grafik Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Manokwari. Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh persentase inisiator Kepala Daerah mencapai 100%.

**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

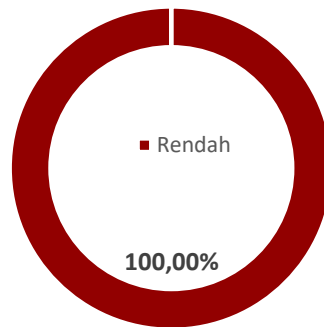


Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Manokwari

Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Manokwari pada Gambar 19 di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari tergolong dalam urusan Komunikasi dan Informatika.



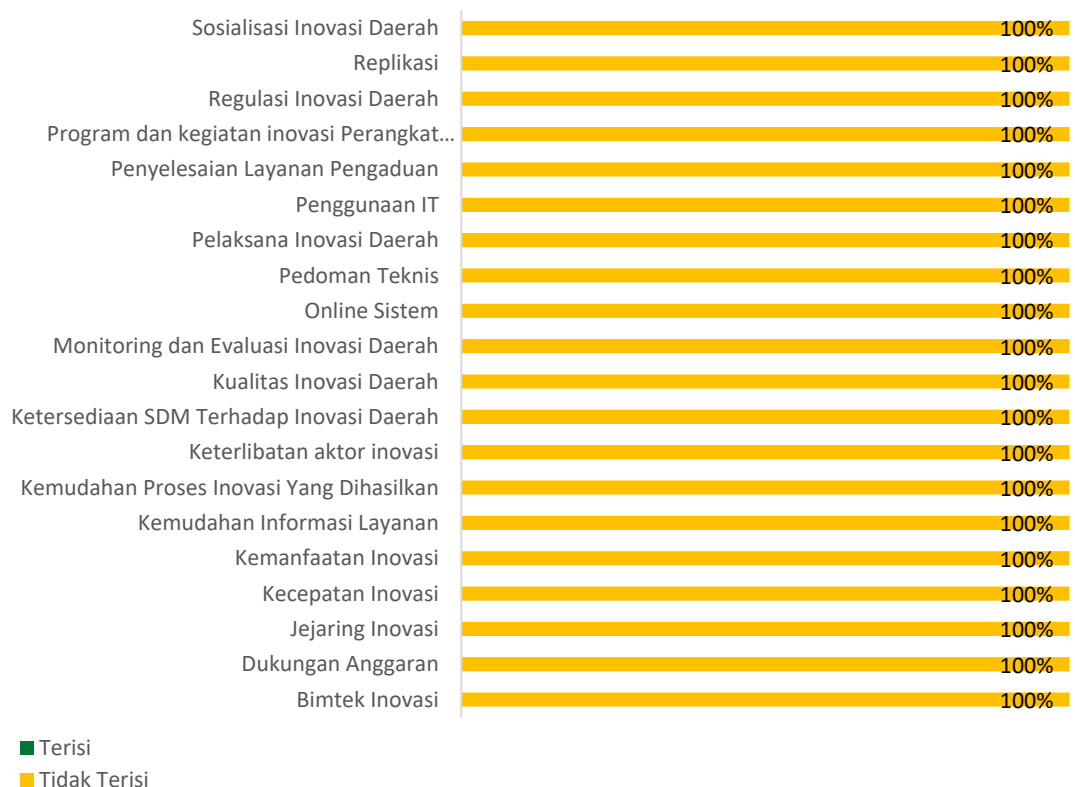
### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Manokwari

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Grafik di atas, diketahui bahwa keseluruhan inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari memiliki skor kematangan rendah. Artinya inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari berada pada skor di bawah 50.

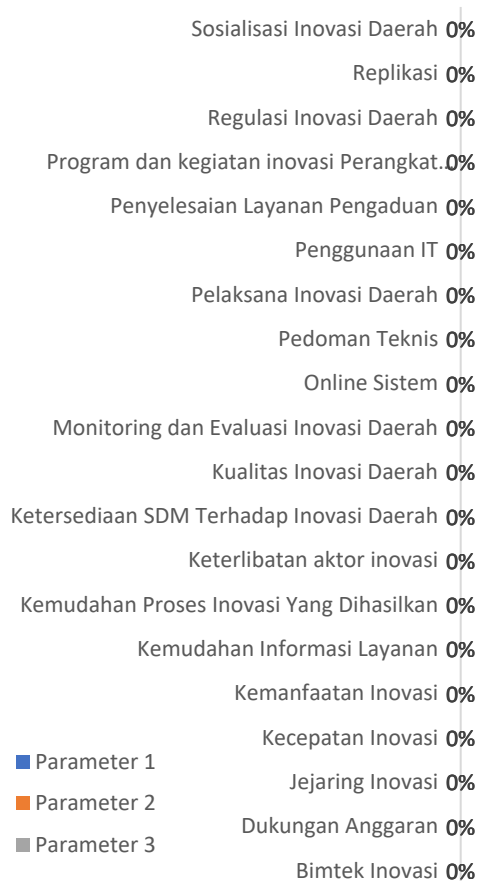
### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manokwari

Gambar 21 menunjukkan grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manokwari. Melalui grafik tersebut diketahui bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Merauka seluruhnya tidak terisi oleh data pendukung.

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

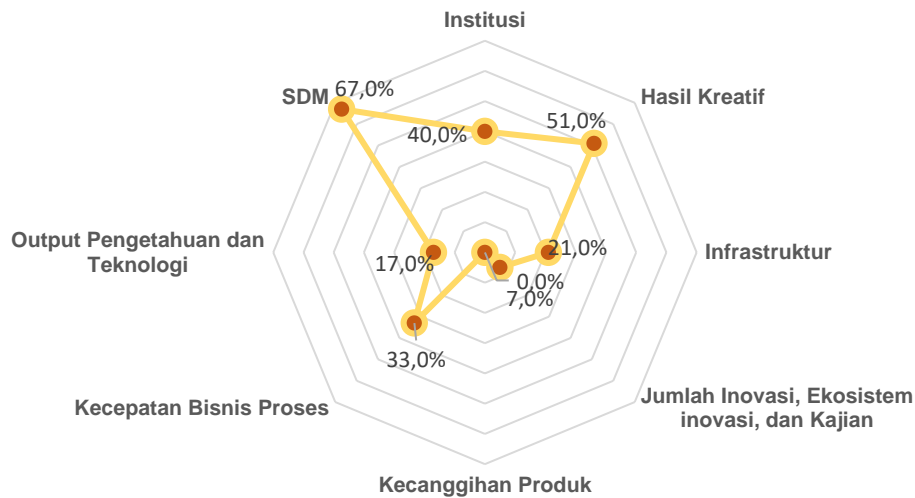
Gambar 22 menampilkan data parameter yang menyusun indicator pendukung inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari. Berdasarkan grafik sebelumnya disebutkan bahwa inovasi-inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari tidak terisi data pendukung, sehingga tidak ada parameter yang menyusunnya.

**j. Daftar Inovasi Kabupaten Manokwari beserta Skor Kematangannya**

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Manokwari beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Jaringan intra pemerintah berbasis fiber optik "MANOKWARI SMART CITY"	0

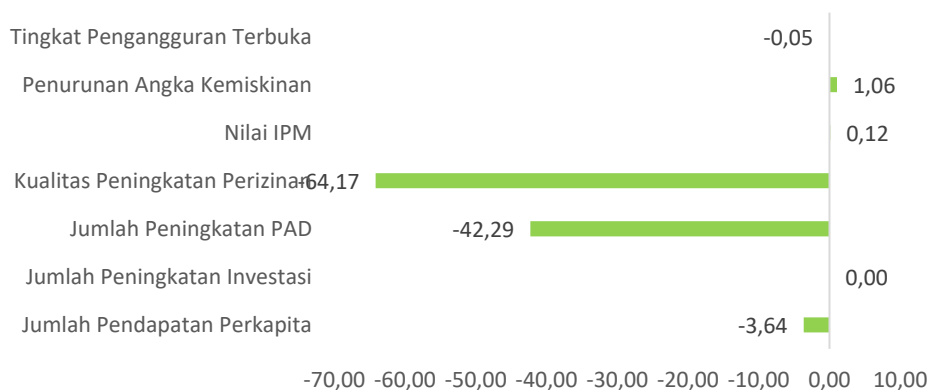
### C. KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Manokwari Selatan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Manokwari Selatan memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu mencapai skor maksimal 67.0%. Diikuti oleh variabel Hasil Kreatif dengan skor capaian sebesar 51.0%. Sementara itu, variabel dengan skor terendah adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian, dengan skor capaian sebesar 0.0%.

#### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manokwari Selatan

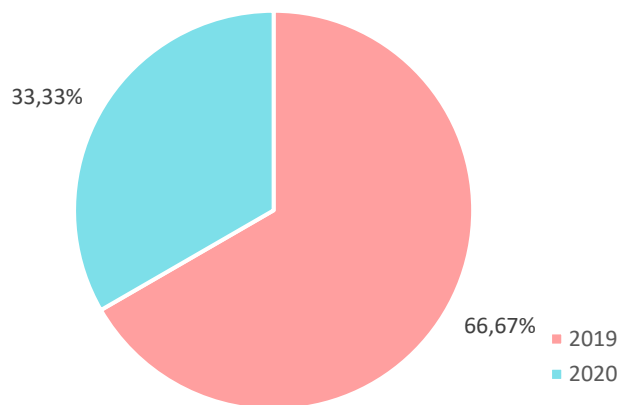
Grafik pada Gambar 24 menampilkan capaian aspek satuan pemerintah daerah pada Kabupaten Manokwari Selatan. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manokwari Selatan belum mengalami perkembangan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya indikator yang tidak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan. Indikator yang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan sama sekali (skor 0%) adalah indikator Jumlah Peningkatan Investasi. Adapun secara standar nasional indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0.45%. Selanjutnya indikator tingkat pengangguran

menunjukkan angka -0.05, yang artinya tingkat pengangguran di Kabupaten Manokwari Selatan mengalami peningkatan sebesar 0.05%. Namun demikian, peningkatan yang terjadi masih lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan secara nasional yang mencapai 0.92%. Penurunan aspek satuan pemerintah daerah sangat jelas terlihat pada indikator kualitas peningkatan perizinan dan jumlah peningkatan PAD, yaitu berturut-turut mengalami penurunan sebesar 64.17% dan 42.29%. Penurunan juga terjadi pada indikator jumlah pendapatan perkapita, yaitu sebesar -3.64. Namun demikian, angka ini tidak jauh berbeda dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan penurunan sebesar 1.85%.

Sementara itu, indikator yang mengindikasikan perkembangan cukup baik adalah indikator penurunan angka kemiskinan dan nilai IPM. Melalui grafik terlihat bahwa indikator penurunan angka kemiskinan sebesar 1.06% yang artinya mengalami penurunan sebesar 1.06%. Cukup baik dibandingkan dengan penurunan kemiskinan secara nasional yaitu hanya sebesar 0.02%. Begitu pula dengan indikator Nilai IPM menunjukkan peningkatan sebesar 0.12% di saat standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan angka 0% (tidak mengalami peningkatan maupun penurunan).

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

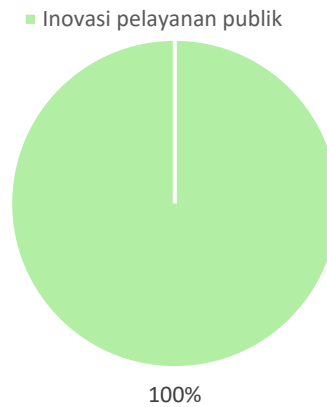
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Manokwari Selatan

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, dari keseluruhan total inovasi yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, diketahui bahwa mayoritas inovasi telah dilaporkan pada tahun 2019, yaitu sebanyak 66.67% inovasi, sedangkan 33.33% sisanya merupakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari Selatan diterapkan pada tahun 2020..

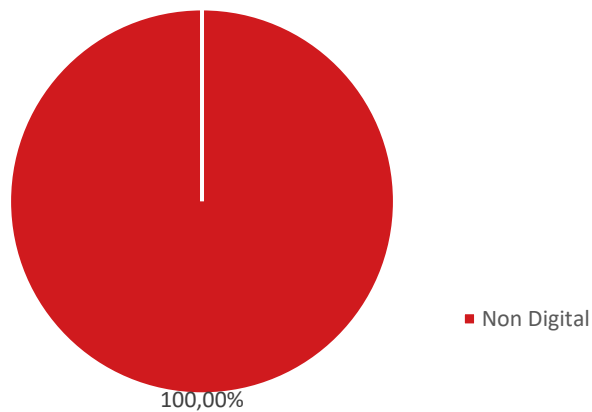
## b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Manokwari Selatan

Berdasarkan diagram yang disajikan pada Gambar 26 di atas, diketahui bahwa inovasi yang ada pada Kabupaten Manokwari Selatan seluruhnya tergolong dalam bentuk inovasi pelayanan public.

## c. Berdasarkan Jenis Inovasi

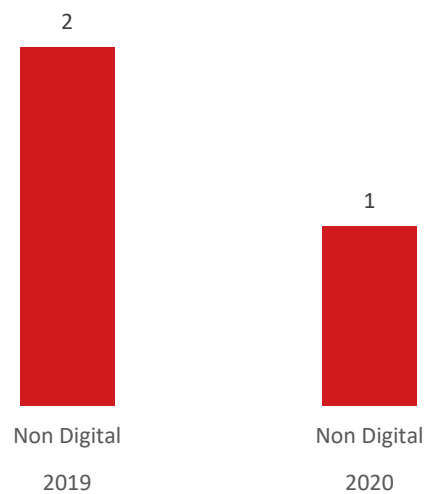


Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Manokwari Selatan

Jenis inovasi daerah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Digital, Non Digital dan Teknologi. Namun, berdasarkan diagram pada Gambar 27, diketahui bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari Selatan merupakan jenis inovasi Non Digital.



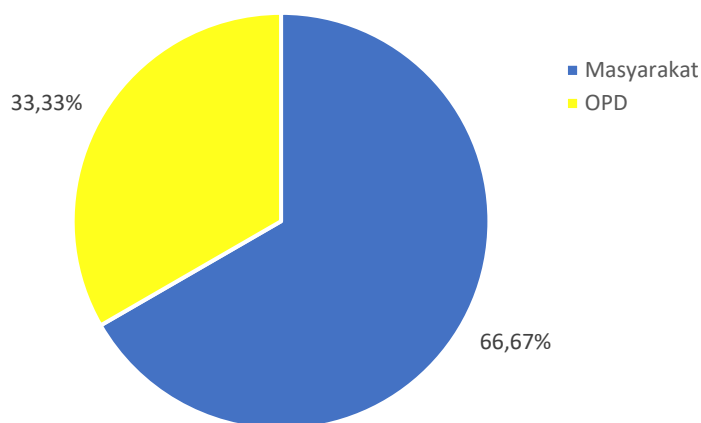
#### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Manokwari Selatan

Sebagaimana dijelaskan pada grafik sebelumnya bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari Selatan seluruhnya tergolong jenis inovasi Non Digital. Selanjutnya Gambar 28 menampilkan grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi. Melalui gambar tersebut, diketahui bahwa jumlah inovasi daerah pada Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2019 sejumlah 2 inovasi, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 1 inovasi. Sehingga total inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari Selatan ada sebanyak 3 inovasi.

#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Manokwari Selatan

Melalui diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi yang disajikan pada Gambar 29 diketahui bahwa dari tiga inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari Selatan, dua diantaranya (66.67%) diinisiasi oleh Masyarakat. Sedangkan satu inovasi lainnya diinisiasi oleh OPD.

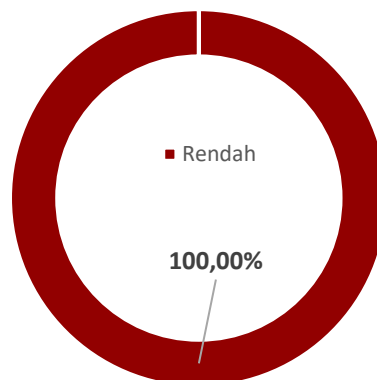
#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Manokwari Selatan

Gambar 30 menunjukkan grafik jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan pada kabupaten Manokwari Selatan. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari Selatan terbagi atas tiga urusan pemerintahan, yaitu urusan Lingkungan Hidup, Kesehatan, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana masing-masing urusan diwakili oleh satu inovasi.

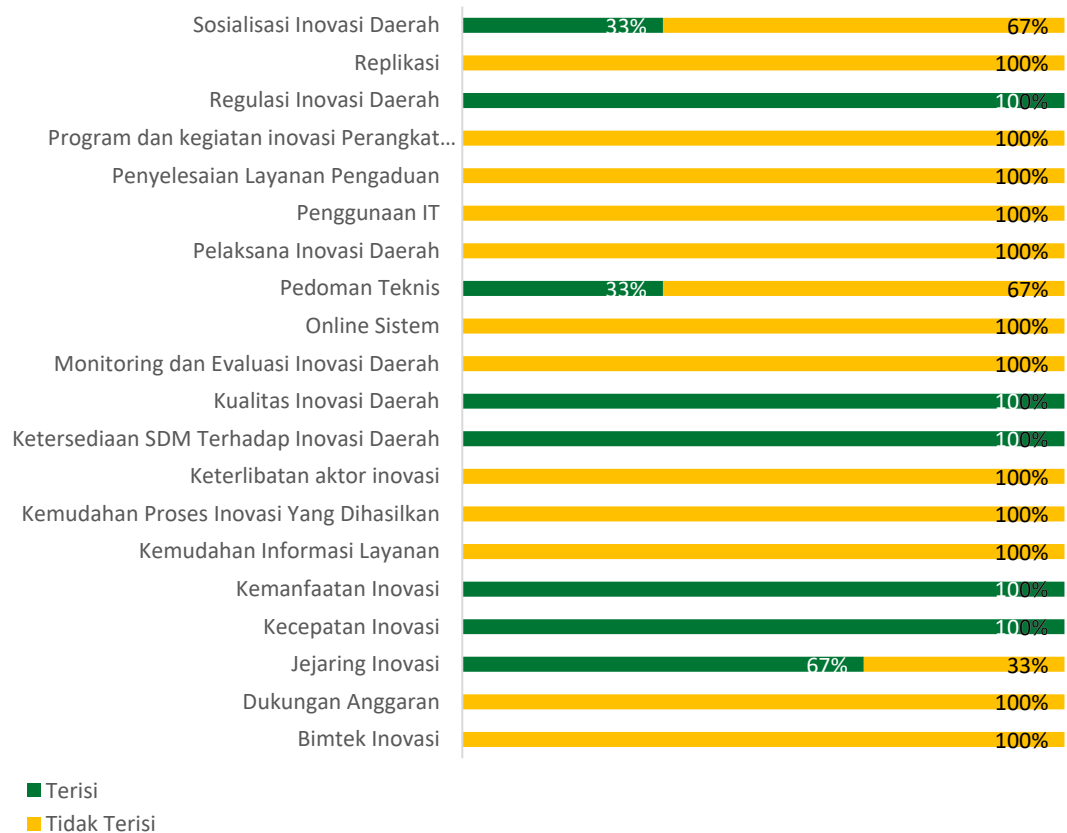
#### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Manokwari Selatan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, keseluruhan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari Selatan masih berada pada tingkat kematangan rendah, yaitu mencapai 100%. Artinya inovasi yang terdapat pada Kabupaten Manokwari Selatan memiliki skor kematangan di bawah 50.

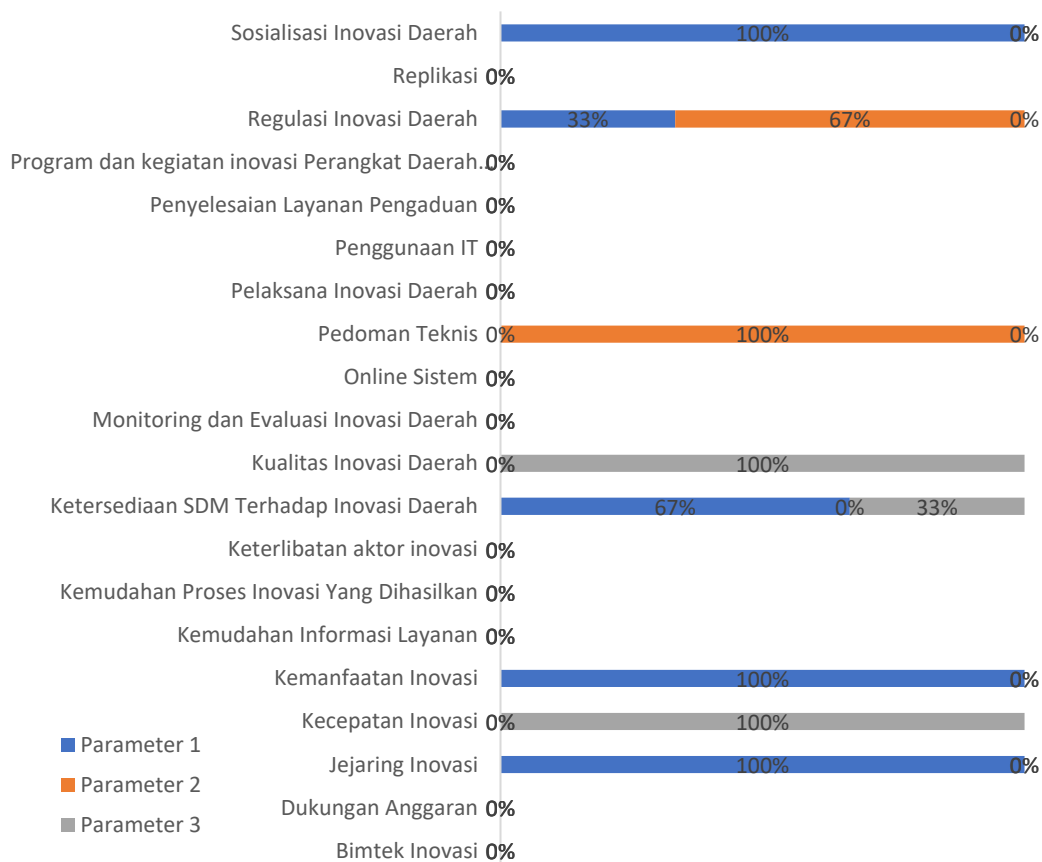
## h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manokwari Selatan

Gambar 32 menyajikan Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Melalui grafik tersebut, diketahui bahwa indikator-indikator indeks inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Manokwari Selatan mayoritas tidak terisi data pendukung. Sebanyak 68.33% atau 12 indikator belum terisi data dukung, sedangkan 31.67% lainnya atau sebanyak 8 indikator sudah terisi data dukung.

## i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

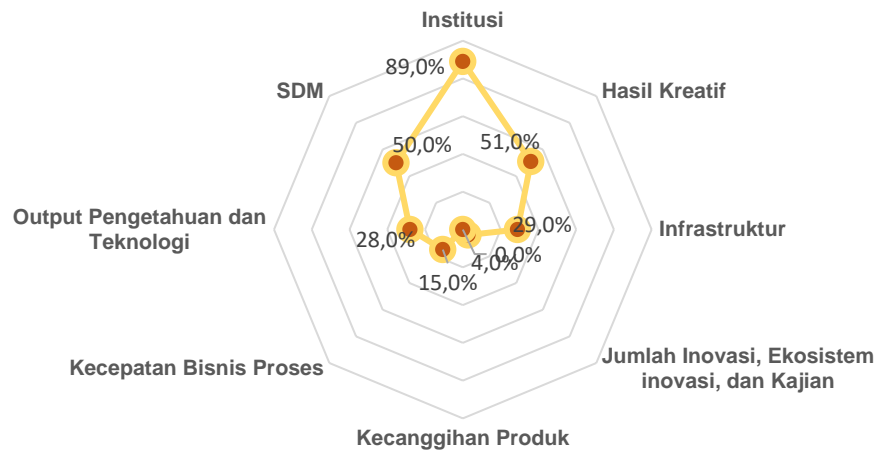
Memalui grafik sbeelumnya dijelaskan bahwa hanya ada 8 indikator yang telah terisi data dukung. Selanjutnya Gambar 33 menampilkan Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah. Berdasarkan grafik tersebut, dikatehui bahwa 20.00% data dukung tersusun atas parameter 1, 8.33% data dukung tersusun atas parameter 2, dan 11.67% data dukung tersusun atas parameter 3.

## j. Daftar Inovasi Kabupaten Manokwari Selatan beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Manokwari Selatan beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
BANK DARAH HIDUP (BDHI) KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	43
BUDAYA KERJA COVID 19 MENUJU NEW NORMAL (BUKER COVID 19 JUNEWMAL) DUKCAPIL KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	42
GREENHOUSE GAS STRATEGY (GGS) KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	40

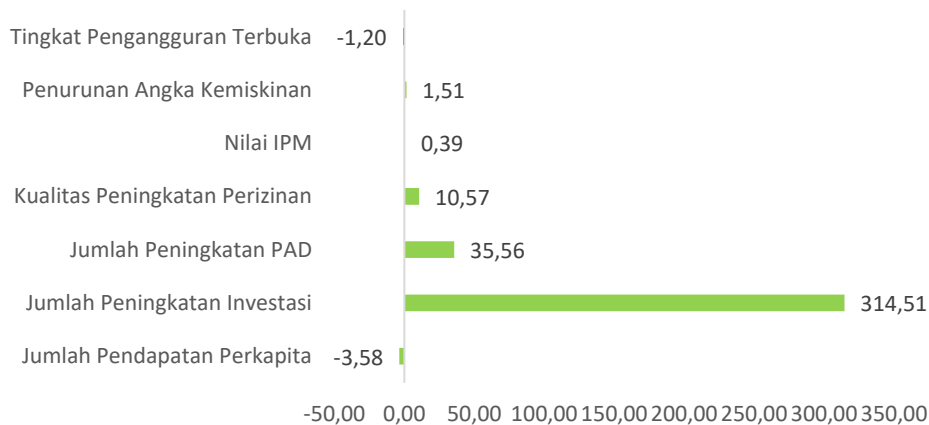
## D. KABUPATEN TELUK WONDAMA



Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Teluk Wondama

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Teluk Wondama memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu mencapai angka 89.0. Angka ini tergolong jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat capaian variabel lainnya. Hal ini dibuktikan dengan skor yang menempati posisi kedua hanya sebesar 51%, yaitu variabel Hasil Kreatif, diikuti oleh variabel SDM sebesar 50.0%. Selanjutnya, variabel dengan skor terendah dengan skor 0% adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian.

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Teluk Wondama

Capaian aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama telah disajikan pada Gambar 35. Berdasarkan grafik pada Gambar 35 di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Teluk Wondama memiliki perkembangan yang baik, ditunjukkan oleh capaian indikator yang memiliki skor lebih baik dibandingkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi sangat jelas terjadi peningkatan sangat tinggi, yaitu mencapai 314.51%. Diikuti oleh indikator Jumlah Peningkatan

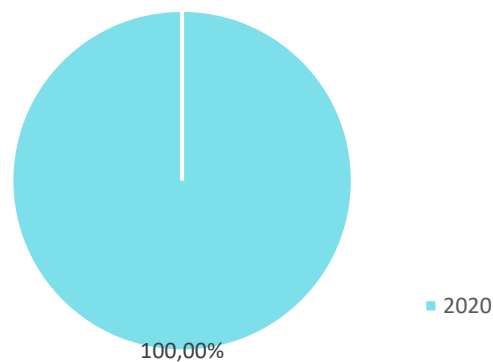


PAD dan Kualitas Peningkatan Perizinan yang secara berturut-turut sebesar 35.56% dan 10.57%. Berikutnya indicator Nilai IPM Kabupaten Teluk Wondama mengalami peningkatan sebesar 0.39, lebih tinggi dibandingkan standar secara nasional yang menunjukkan angka 0%. Indikator berikutnya yang mengindikasikan perkembangan aspek satuan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama adalah indicator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan angka 1.51%. Artinya angka kemiskinan di Kabupaten Teluk Wondama mengalami penurunan sebesar 1.51%. Angka ini cukup jauh lebih baik dari standar nasional yang menunjukkan penurunan sebesar 0.02%.

Berikutnya beberapa indicator aspek Pemerintah Daerah di Kabupaten Teluk Wondama menunjukkan adanya penurunan kualitas. Indikator yang dimaksud adalah indicator Jumlah Pendapatan Perkapita dan Tingkat Pengangguran Terbuka, dimana indicator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 3.58%, sedangkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah mengalami penurunan sebesar 1.85%. Adapun indicator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angka -1.20% yang artinya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Teluk Wondama mengalami peningkatan sebesar 1.20%. Sedangkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0.92%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

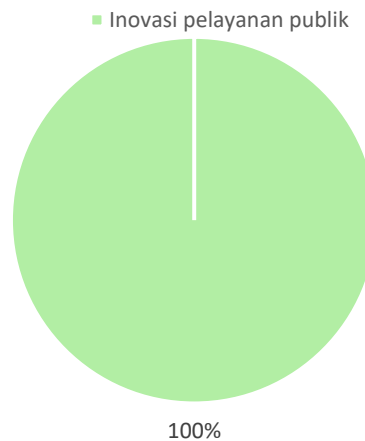
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Teluk Wondama

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Teluk Wondama diterapkan pada tahun 2020. Tidak ada inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 di Kabupaten Teluk Wondama.

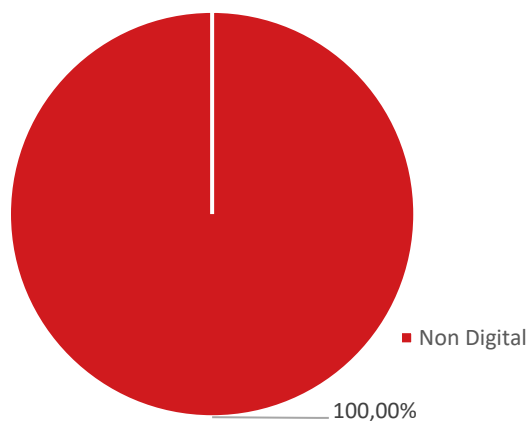
## b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Teluk Wondama

Berdasarkan bentuk inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Teluk Wondama termasuk dalam bentuk Inovasi Pelayanan Publik, yaitu mencapai 100%.

## c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Teluk Wondama

Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Teluk Wondama telah disajikan pada Gambar 38. Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Teluk Wondama merupakan inovasi Non digital.

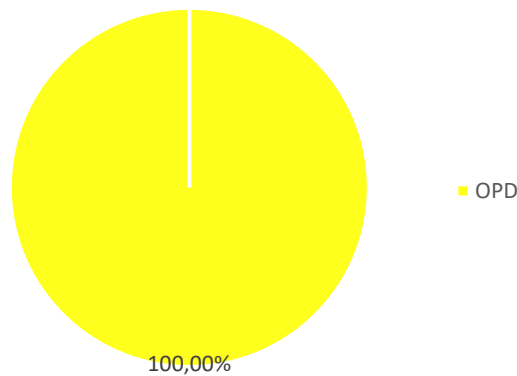
#### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Teluk Wondama

Berdasarkan tahun dan jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Teluk Wondama, diketahui bahwa hanya ada satu inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Teluk Wondama. Jenis inovasi tersebut adalah inovasi Non Digital dan diterapkan pada tahun 2020.

#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Teluk Wondama

Gambar di atas menunjukkan grafik Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Teluk Wondama. Berdasarkan grafik tersebut diketahui inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Teluk Wondama diinisiasi oleh Perangkat Daerah (OPD).

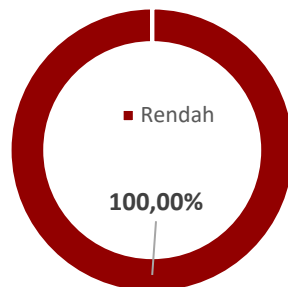
#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Teluk Wondama

Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Teluk Wondama pada Gambar 41 di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Teluk Wondama tergolong dalam urusan Kesehatan.

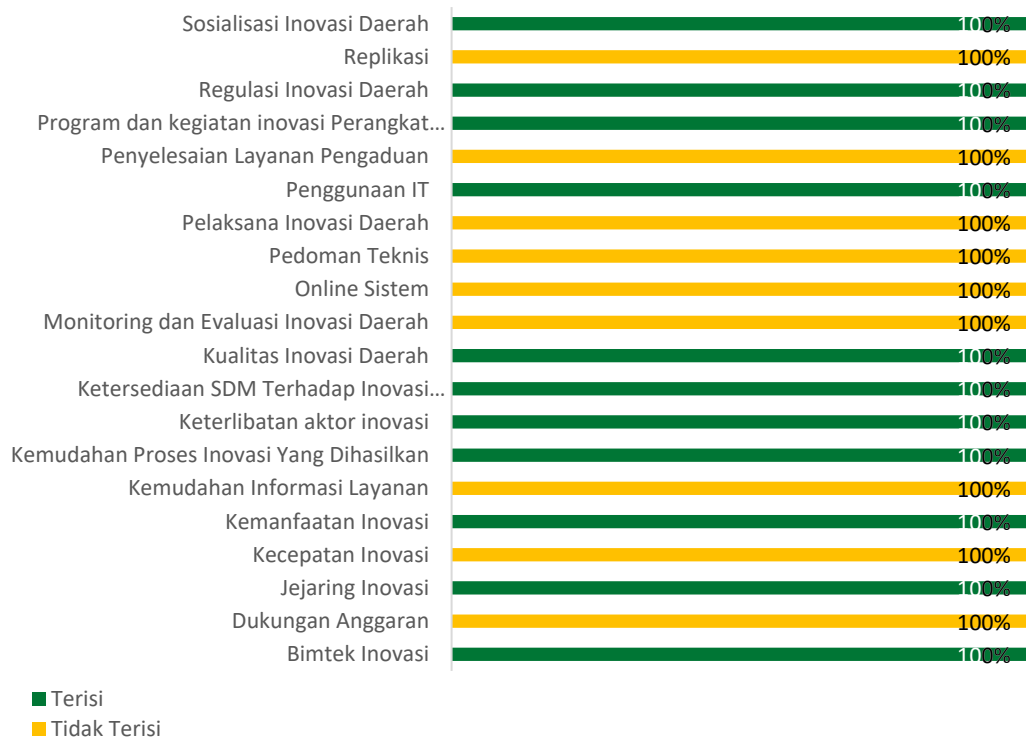
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Teluk Wondama

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Grafik di atas, diketahui bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Teluk Wondama berada pada skor kematangan level rendah. Artinya inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Teluk Wondama berada pada skor di bawah 50.

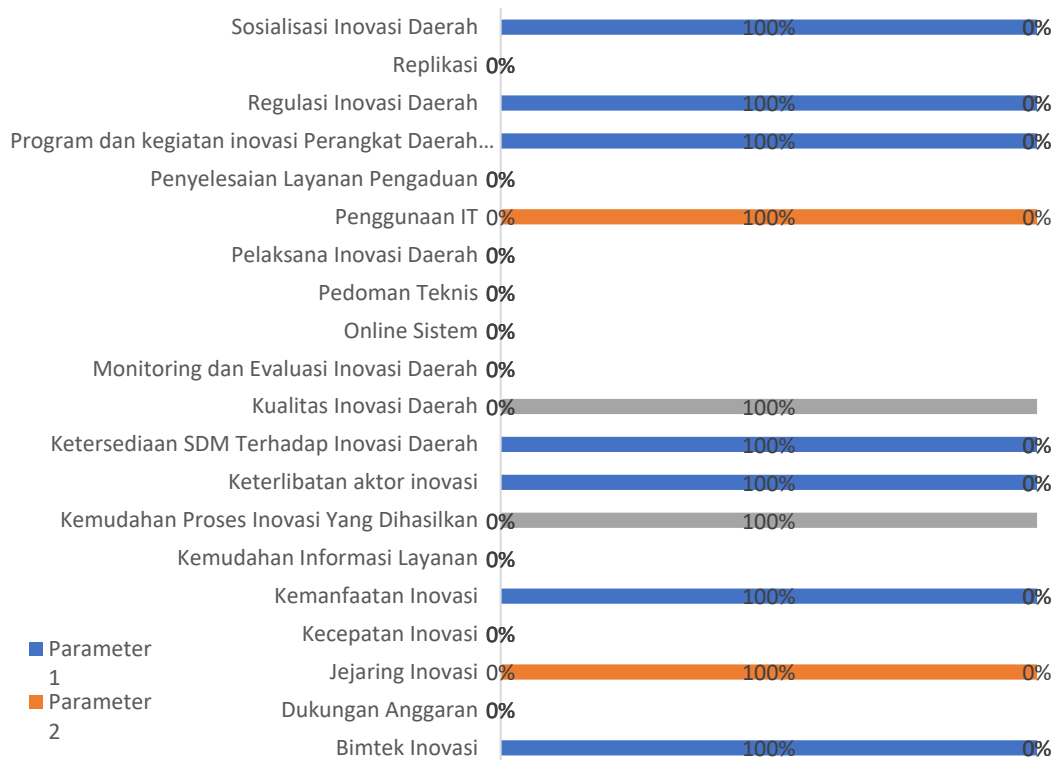
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Teluk Wondama

Gambar 43 menunjukkan grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Melalui grafik tersebut diketahui bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Teluk Wondama telah 55% terisi oleh data pendukung (atau sebanyak 11 indikator telah terisi oleh data dukung). Sedangkan yang belum terisi oleh data dukung ada sebanyak 45% (sebanyak 9 indikator).

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

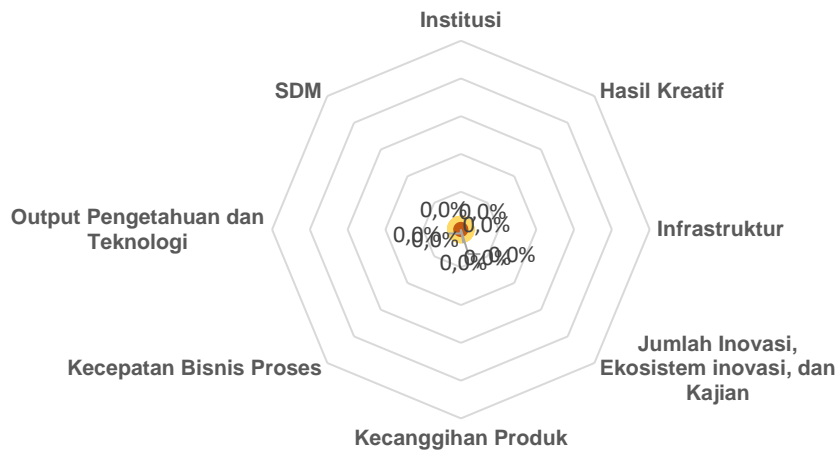
Berdasarkan grafik pada Gambar sebelumnya (Gambar 43), diketahui bahwa indicator inovasi daerah yang telah terisi dengan data pendukung ada sebanyak 11 indikator. Selanjutnya Gambar 44 menampilkan data parameter yang menyusun data dukung indicator inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Teluk Wondama. Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa data dukung indicator inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Teluk Wondama tersusun atas 35.00% Parameter 1, 10% Parameter 2, dan 10% Parameter 3.

**j. Daftar Inovasi Kabupaten Teluk Wondama beserta Skor Kematangannya**

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Teluk Wondama beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
JKN TERINDAH ( JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TERINTEGRASI DAN MUDAH )	39

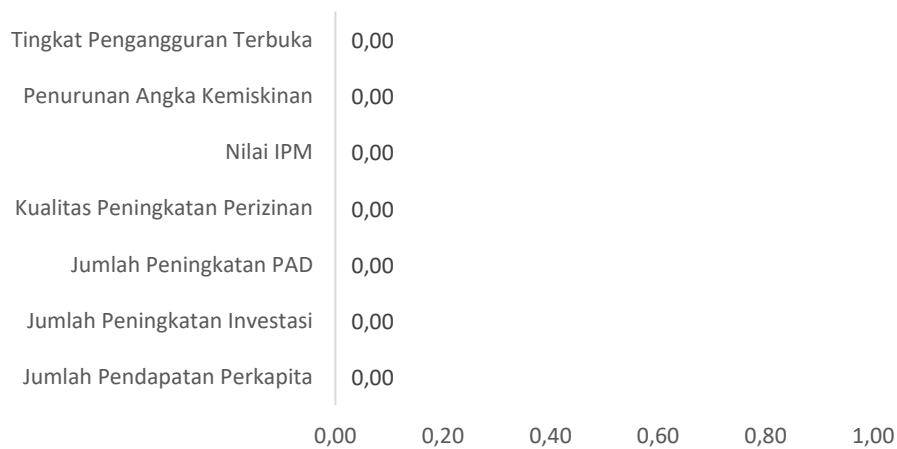
## E. KOTA SORONG



Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Sorong

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, diketahui bahwa seluruh variabel ukur indeks inovasi daerah pada Kota Sorong memiliki skor 0%.

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



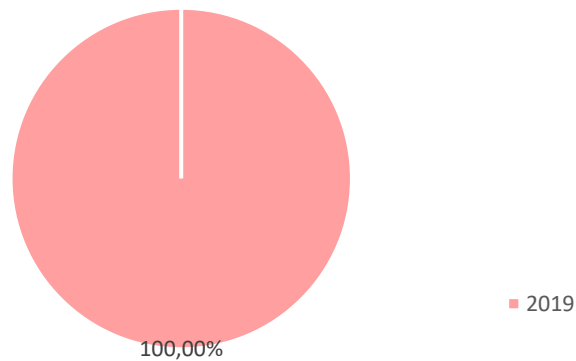
Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Sorong

Gambar 46 menunjukkan grafik capaian aspek Satuan Pemerintah Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah yang diperoleh dari Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kota Sorong belum mengalami perkembangan yang signifikan secara keseluruhan. Seluruh indikator aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Sorong menunjukkan angka 0.00%, yang artinya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.



## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

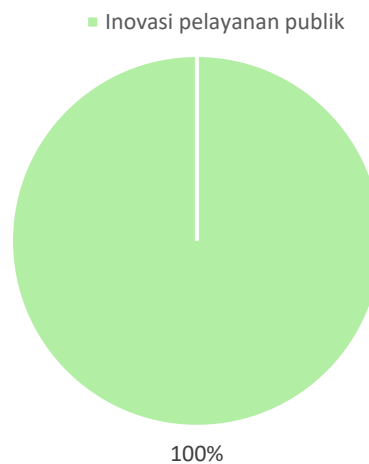
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Sorong

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sorong diterapkan pada tahun 2019. Tidak ada inovasi yang diterapkan pada tahun 2020 di Kota Sorong.

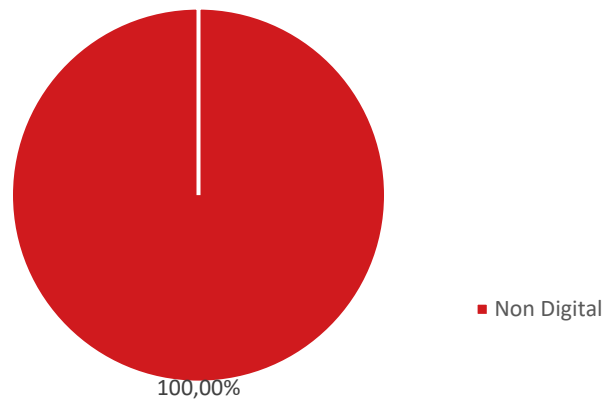
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Sorong

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sorong termasuk dalam bentuk Inovasi Pelayanan Publik. Tidak ada bentuk inovasi lainnya yang dilaporkan oleh Kota Sorong.

### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Sorong

Gambar 49 menyajikan Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Sorong. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Sorong termasuk dalam inovasi Non Digital

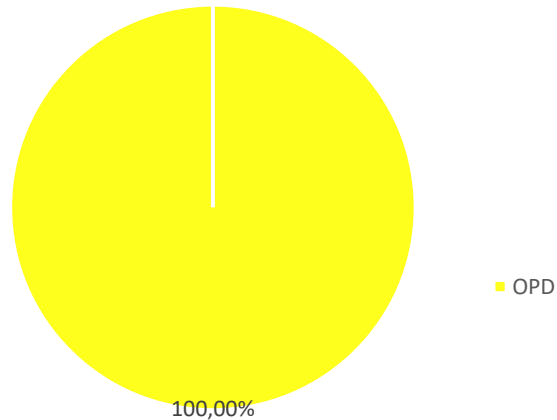
### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Sorong

Berdasarkan tahun dan jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sorong, diketahui bahwa hanya ada satu inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sorong. Jenis inovasi tersebut adalah inovasi Non Digital dan diterapkan pada tahun 2019.

#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Sorong

Gambar di atas menunjukkan grafik Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Sorong. Berdasarkan grafik tersebut diketahui inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Sorong diinisiasi oleh Perangkat Daerah (OPD).

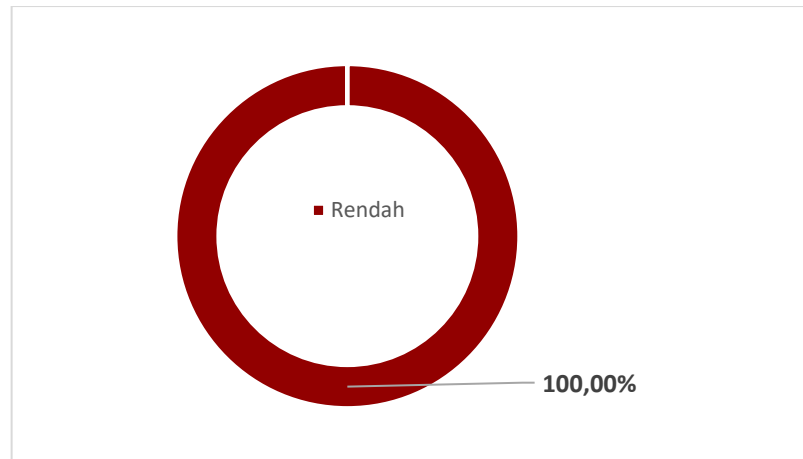
#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Sorong

Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Sorong pada Gambar 52 di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Sorong tergolong dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Sorong

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Grafik di atas, diketahui bahwa inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Sorong berada pada level skor kematangan rendah, mencapai 100%. Artinya inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Sorong berada pada skor di bawah 50.

### h. Daftar Inovasi Kota Sorong beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kota Sorong beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
KERJA SABTU MINGGU (KERJA SAGU)	0



# ***BAB III***

---

## ***PEMBAHASAN REKOMENDASI***





Pada Provinsi Papua Barat terdapat 5 Kabupaten/Kota namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

#### **A. Kabupaten Teluk Wondama**

Kabupaten Teluk Wondama memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 33,68 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Papua Barat dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Teluk Wondama melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

#### **B. Kabupaten Manokwari Selatan**

Kabupaten Manokwari Selatan memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 26,91 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Papua Barat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Manokwari Selatan melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

#### **C. Kabupaten Kaimana**

Kabupaten Kaimana memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 26,72 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Papua Barat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kaimana melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

#### **D. Kabupaten Manokwari**

Kabupaten Manokwari memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 0,08 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Papua Barat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Manokwari melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

#### **E. Kota Sorong**

Kota Sorong memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 0,08 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah Namun Provinsi Papua Barat melakukan pembinaan kepada Kota Sorong melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah

